



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	13
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# Wako Diadukan, Kadis Siap Buka Data

## Soal Pembangunan Pasar Padangkaduduak

**Payakumbuh, Padang**—Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi diadukan LSM Ampera Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), September lalu. Salah satu poin yang digudang LSM ini kepada komisi antirasuah tersebut, terkait keberadaan Pasar Rakyat Payakumbuh II atau Pasar Padangkaduduak di Kelurahan Tigo Koto Di Ateh, Kecamatan Payakumbuh Utara.

"Ya, ada lima objek pembangunan yang kita laporkan. Termasuk, Pasar Padangkaduduak. Pengaduan tersebut terkait dengan dugaan penggelembungan harga satuan pada proses ganti-rugi lahan dan dugaan penelantaran aset daerah," kata Edwar Hafri, Koordinator LSM Ampera Indonesia yang dikonfirmasi *Padang Ekspres*, Senin malam (8/10).

Sampai tadi malam, belum terdengar adanya tindak lanjut dari KPK terkait laporan LSM Ampera ini. Mungkin, karena laporan yang masuk ke KPK dari daerah-daerah itu terlalu banyak setiap bulannya. Sementara, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi juga tidak pernah mengomentari laporan tersebut kepada awak media.

Menariknya, kemarin sore (8/10), *Padang Ekspres* menerima siaran pers dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Payakumbuh. Dalam siaran pers yang dikirim lewat aplikasi pesan lintas platform (*WhatsApp*) tersebut, Diskominfo Payakumbuh mengurai penjelasan dari Kadis Kopek-indag, Pasar dan UMKM Dahler, terkait laporan LSM Ampera ke KPK.

Sebelum siaran pers dari Diskominfo itu diterima *Padang Ekspres*, Dahler juga sempat menghubungi wartawan koran ini pada Senin siang. "Saya mau memberi penjelasan soal Pasar Padangkaduduak, untuk dimuat di media. Di mana, kita bisa bertemu," katanya.

Meski tak jadi bertemu dengan awak media, tapi Dahler menjelaskan siaran pers yang dikirim Diskominfo. Dalam siaran pers itu, intinya Dahler menegaskan bahwa laporan LSM Ampera ke KPK tidak relevan. Bahkan, Dahler mengaku bersedia membuka data dan fakta yang riil kepada masyarakat jika diminta oleh pihak berwenang melalui legalitas formal.

"Tidak relevan apa yang dituduhkan LSM Ampera kepada wali kota Payakumbuh. Saya sebagai Kadis Pasar, tahu betul bagaimana perjalanan Pasar Padang Kaduduak ini. Data dan faktanya ada diarsip saya. Kapanpun bisa dibuka jika diminta oleh pihak berwenang secara legal dan formal," kata Dahler dalam siaran pers tersebut.

Dahler menjelaskan, dalam pembangunan Pasar Padang Kaduduak yang mulai berjalan pada tahun 2016 silam, sudah dua kali dilakukan pengecekan oleh Ditjen Perdagangan RI. Hasilnya, tidak ada ditemukan pelanggaran baik dari sisi keuangan, pembangunan maupun administrasi.

"Sudah dua kali Inspektori Jenderal Kementerian Perdagangan RI melakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ada masalah. Semua sudah selesai dan itu tertuang dalam surat Inspektori Jenderal Kementerian Perdagangan RI kepada Wali Kota

Payakumbuh U.P. Kepala Dinas Koperasi, UMKM Payakumbuh Nomor 704/UJ-DAG.1/SD/08/2018," katanya.

Dahler merasa apa yang dituduhkan LSM Ampera kepada Wali Kota sebuah upaya untuk merusak kenyamanan masyarakat Payakumbuh. Fasalnya, perwakilan LSM Ampera yang melapor ke KPK diruding Dahler dalam siaran pers Diskominfo, kerap membuat su dan laporan untuk menyudutkan wali kota Payakumbuh dengan mengubah-ubah status pekerjaan.

"Yang melapor ke wali ke KPK ini seperti membawa persoalan pribadi dengan mengabaikan kenyamanan publik. Kadang dia wartawan, kadang aktivis, kadang pengurus LSM, kadang dari organisasi ini dan itu. Orangnya itu-itu juga. Jadi, masyarakat Payakumbuh tidak perlu terganggu atas ulah orang-orang ini," kata Dahler yang juga Ketua Pemuda Pancasila Payakumbuh.

Tidak itu saja, dalam siaran pers yang diterima *Padang Ekspres* dari Diskominfo, Dahler menilail pelaporan Wali Kota ke KPK oleh LSM Ampera sudah meremehkan kredibilitas penegak hukum Kota Payakumbuh. Dahler yakin, jika ada pelanggaran dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik polisi maupun kejaksaan pasti akan bergerak. Karena, penegak hukum di Payakumbuh sangat solid dan cermat dalam bekerja.

"Jika ingin bermain dengan hukum, harusnya mengerti dulu soal hukum. Melapor langsung ke KPK, berarti tidak mempercayai polisi dan kejaksaan sebagai penegak hukum tingkat lokal. Harusnya, lapor dulu ke penegak hukum tingkat lokal," kata Dahler dalam siaran pers yang diterima *Padang Ekspres*.

Di sisi lain, Koordinator LSM Ampera Indonesia Edwar Hafri yang dikonfirmasi *Padang Ekspres* memastikan tidak ada persoalan pribadi antara dirinya dengan kepala daerah. Laporan semata-mata disampaikan sebagai warga negara yang peduli dengan gerakan antikorupsi. "Saya melapor karena dugaan penggelembungan harga satuan pada proses ganti-rugi lahan dan dugaan penelantaran aset daerah, karena itu hak saya sebagai warga negara," ujarnya.

Berisakan pantauannya, menurut Edwar, Pasar Padangkaduduak diduga sudah berubah fungsi. Peruntukkan pasar diduga menyimpang dari RT/RW yang ada. "Contoh terkini, pak Wai sudah menanganikan Padangkaduduak sebagai kampung Al Quran. Di kampung ini adalah sekolah agama. Tapi sekarang di Pasar Padangkaduduak malah ada Pasar Malam. Kok ada pasar malam di kampung Al Quran," tanyanya.

Edwar juga mempertanyakan balik, apakah salah bila LSM Ampera Indonesia melapor ke KPK? "Kenapa pula ada istilah melecehkan aparat penegak hukum di kota ini? Ini kan hak sebagian warga negara," ujar Edwar yang dari Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Sumbar juga tercatat sebagai salah satu caleg dari Dapil Payakumbuh dan Limapuluh Kota. (frv)